



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARYONO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAN DAN ALUMNI
3. NHK : 932328

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **665.000.000**

1. Tanah Seluas 8.325 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **73.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **8.326.741**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **746.826.741**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **746.826.741**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.